

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Jakarta

## 75.000 Bansos KJP Plus Bocor

### Pemerintah Provinsi Jakarta melakukan finalisasi satu data pembangunan agar penyaluran bansos tepat sasaran.

JAKARTA - Setelah diuji dan diverifikasi ulang oleh dinas pendidikan (Disdik) Jakarta, maka ditemukan kebocoran di mana sekitar 75.000 siswa usia 6-21 tahun tidak layak menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I Tahun 2023. Temuan itu didapat berdasarkan DTKS per Februari ditambah per November 2022.

"Untuk itu, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS untuk kategori penerima Kartu Jakarta Pintar alias KJP Plus akan diuji dan diverifikasi ulang. Demikian juga dengan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KIMU," tandas Pelaksana Tugas Kepala Disdik Jakarta, Purwosusilo, Rabu (11/10).

"Terhadap data penerima

KJP Plus dan KIMU, akan kami lakukan uji kelayakan dan verifikasi ulang. Tujuannya, untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat dua bansos tersebut," jelas Purwosusilo. Hal tersebut mengacu pada Surat Edaran KPK Nomor 11 Tahun 2020. Bunyinya, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat melakukan pendataan di lapangan untuk keperluan pemberian bantuan sosial dengan menggunakan rujukan, DTKS.

Purwosusilo menjelaskan, tahapan penetapan kelayakan dan verifikasi ulang DTKS adalah pemadanan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta. Tujuannya, untuk memastikan kebenaran sebagai warga Jakarta ditunjukkan dengan memiliki NIK dan KK Jakarta. Juga berdomisili di DKI.

Dalam KK tidak ada yang berstatus sebagai ASN, TNI, Polri, anggota legislatif, pegawai BUMN, ataupun BUMD. Kedua, pemadanan dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memastikan tidak memiliki kendaraan roda empat. Juga

tidak memiliki aset tanah atau bangunan bernilai Jual Objek Pajak di atas 1 miliar rupiah.

Terakhir, diputuskan dalam musyawarah kelurahan sebagai keluarga tidak mampu, sehingga berhak menerima bansos. "Setiap tahun Disdik

akan finalisasi satu data pembangunan agar penyaluran bansos tepat sasaran.

"Saat ini sedang dilakukan finalisasi satu data pembangunan. Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial juga menjadi perhatian Pem-

gram-program pembangunan, seperti pemberian KJP, KJMU, Kartu Anak Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta dan Bantuan Pangan.

### Tak Layak

Sementara itu, terkait kebocoran 75.000 siswa usia 6-21 tahun tidak layak menerima KJP Plus Tahap I Tahun 2023, menurut Purwosusilo, hal itu ditemukan setelah uji kelayakan dan verifikasi. Tepatnya, ada 75.497 siswa tidak layak terima KJP Plus. Alamatnya kosong sebanyak 36 siswa. Kemudian, alamat tidak ditemukan sebanyak 22.024 siswa.

Total data penerima KJP Plus Tahap I Tahun 2023 sebanyak 662.194 anak usia 6-21 tahun. Lalu, ditemukan juga anggota keluarga PNS/TNI/Polri sebanyak 1.219 siswa. Lalu, memiliki mobil sebanyak 21.462 siswa. Memiliki Nilai Jual Objek Pajak di atas 1 miliar sebanyak 1.244 siswa.

Parahnya, anak keluarga mampu sebanyak 16.371 siswa. Pindah ke luar Jakarta sebanyak 11.867 siswa. ■ Ant/G-1



Jakarta akan terus konsisten melakukan uji kelayakan dan verifikasi ulang secara berkelanjutan," ujar Purwosusilo.

Uji kelayakan dan verifikasi ulang data penerima bansos pendidikan KJP Plus dan KJMU untuk memastikan pemberian bansos pendidikan tepat sasaran. Sebelumnya, Penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, menuturkan Pemerintah Provinsi Jakarta melaku-

prov Jakarta," kata Heru, Selasa (10/10). Finalisasi satu data pembangunan, kata Heru, sebagai basis data tunggal yang bersumber dari DTKS dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Selain itu, data tersebut juga menjadi sumber dari beberapa data sumber lain yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pro-